



Jamkrida Lolos Modal Rp 50 M APBD

★ Tarung Anggaran *Game Over* Berkat

Turun Tangan Ketua Dewan-Gubernur

DENPASAR, NusaBali
Ribut-ribut soal usulan penyertaan modal Rp 50 miliar di PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)

Provinsi Bali melalui APBD Induk 2016, berakhir dengan kompromi. Penyertaan modal Rp 50 miliar ini akhirnya 'diloloskan' dalam

rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD Induk 2016 di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (4/11), setelah Ketua DPRD

Bali Nyoman Adi Wiryatama dan Gubernur Made Mangku Pastika ikut turun tangan.

Penyertaan modal Rp 50 miliar PT Jamkrida yang

sebelumnya sempat ditolak Fraksi PDIP DPRD Bali, karena dianggap nyelonong dan tak jelas payung hukumnya, terakomodasi

dalam APBD Induk 2016. Hal itu terungkap dalam laporan yang disampaikan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Gubernur dan Komisi II Dewan beda pendapat soal payung hukum penyertaan modal di Jamkrida

Edisi : Kamis, 5 NOV 2015

Hal : 1



Modal Rp 50 M Jamkrida Lolos APBD



Gubernur Pastika (kiri) saat rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD In duk 2016 di DPRD Bali, Rabu (4/11).

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Ketua Pansus Ranperda APBD Induk 2016 DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Ketut Kariyasa Adnyana.

Selain penyampaian laporan oleh Ketua Pansus Ranperda APBD Induk 2016, dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Rabu kemarin, juga ada penyampaian Pansus Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Bali 2015-2029 oleh Ketua Pansus I Wayan Rawan Atmaja (dari Fraksi Golkar) dan penyampaian Pansus Pemberian Insentif - Kemudahan Penanaman Modal oleh Ketua Pansus I Gusti Putu Budiarta (dari Fraksi PDIP).

Rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD Induk 2016 yang mengakomodasi masuknya penyertaan modal Rp 50 miliar ke PT Jamkrida kemarin, dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (Fraksi PDIP), didampingi Wakil Ketua Dewan Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar), IGB Alit Putra (Fraksi Demokrat), dan Jro Komang Swastika (Fraksi Gerindra). Selain Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga hadir Wagub Bali Ketut Sudikerta, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pelayun, dan Kapolda Bali Irjen Sugeng Priyanto.

Bocoran yang diperoleh NusaBali, sebelum rapat paripurna digelar, sempat terjadi beragam manuver, Rabu pagi pukul 08.30 Wita. Salah satunya, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama mendadak panggil unsur pimpinan dari para Wakil Ketua Dewan, para Ketua Fraksi, dan para Ketua Komisi. Inisiatif Adi Wiryatama dilakukan agar Ranperda APBD Induk 2016 bisa diketok palu melalui rapat paripurna,

yang diagendakan Rabu kemarin. Masalahnya, sempat ada isu bahwa rapat paripurna akan ditinggahi hujan interupsi kalangan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali.

Sumber NusaBali di lingkungan dewan menyebutkan, dalam pertemuan dengan Adi Wiryatama pagi itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry sempat berdebat dengan Sekretaris Komisi II DPRD Bali (membidang masalah anggaran), I Made Budastra. Sugawa Korry merupakan pentolan Golkar yang sebelumnya mengusulkan masuknya penyertaan modal Rp 50 miliar di PT Jamkrida melalui APBD Induk 2016. Sedangkan Made Budastra adalah anggota Fraksi PDIP yang sebelumnya menentang keras masuknya penyertaan modal Rp 50 miliar ke Jamkrida, dengan alasan tak ada payung hukumnya.

"Sugawa Korry dan Made Budastra berdebat sengit. Akhirnya, ini diselesaikan di level teratas, babe-babe turun tangan," ujar sumber tersebut. Babe-babe yang dimaksud sumber tadi adalah Ketua Dewan Adi Wiryatama dan Gubernur Mangku Pastika. Karena turun tangannya Ketua Dewan dan Gubernur, akhirnya deal penyertaan modal Rp 50 miliar di PT Jamkrida masuk APBD Induk 2016.

Padahal sehari sebelumnya, Selasa (3/11), Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pelayun sebagai Ketua Tim Anggaran Daerah sempat menelpon Ketua Pansus Ranperda APBD Induk 2016 DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, serta Sekretaris Komisi II DPRD Bali Made Budastra. Tujuannya, untuk menggolkan penyertaan modal Rp 50 miliar di PT

Edisi : Kamis, 4 NOV 2015

Hal : 15



Jamkrida ini. "Namun, upaya Pak Sekda (Tjok Pemaun) mentok. Barulah pagi ini (kemarin) diselesaikan oleh turun tanganya babe-babe," tandas sumber tersebut.

Seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Bali, Rabu kemarin, Gubernur Pastika menyatakan tak ada masalah dengan aturan terkait penyertaan modal Rp 50 miliar ke PT Jamkrida. Menurut Pastika, APBD Induk 2016 tetap mengakomodasi penyertaan modal Rp 50 miliar itu karena merupakan induk dari segala proses penganggaran penyertaan modal yang dimaksud.

Sedangkan yang diributkan (soal tafsir PP 58/2005) di mana harus ada Perda Penyertaan Modal secara khusus untuk tanam saham Rp 50 miliar ke PT Jamkrida, kata Pastika, itu adalah tururannya. "Yang ini (APBD Induk 2016) adalah ibunya. Sementara yang diributkan itu adalah anaknya. Masa duluan anak daripada ibu? Jawabannya gampang sekali itu," tandas Pastika kepada NusaBali.

Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Bali Made Budastra gerah atas pernyataan Gubernur Pastika ini. "Lho, mana yang lebih tinggi Perda atau PP? Anak TK saja tahu mana yang lebih tinggi dari dua payung hukum itu," sergah anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar ini secara terpisah, Rabu kemarin.

Soal kompromi dan dimasukkannya penyertaan modal Rp 50 miliar di PT Jamkrida Provinsi Bali dalam APBD Induk 2016, menurut Budastra, itu sudah diputuskan bersama-sama. "Yang jelas, ini pelajaran bagi eksekutif. Mana ada Perda belakangan dari PP. Kalau kami, acuannya payung hu-

kum yang lebih tinggi. Jangan sampai kita melanggar aturan," tandas mantan anggota DPRD Gianyar ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Adi Wiryatama menegaskan tidak ada tarung Fraksi PDIP vs Fraksi Golkar dalam terkait pembahasan anggaran dalam proses penyertaan modal Rp 50 miliar di Jamkrida ini. "Kalau dikatakan tarung, jelas kami PDIP yang menang. Jumlah kami 24 orang di DPRD Bali. Tapi, soal penyertaan modal di Jamkrida ini, saya sudah panggil unsur Pimpinan Dewan. Saya ambil sikap bahwa Jamkrida penting juga. Sebab, dari penyertaan modal ini kita dapat deviden setiap tahun. Kan bagus itu," tandas politisi senior PDIP ini seusai rapat paripurna, Rabu kemarin.

Mantan Bupati Tabanan dua kali periode ini menegaskan, intinya penyertaan modal Rp 50 miliar di Jamkrida yang sempat membuat situasi memanas itu tetap diakomodasi dalam APBD Induk 2016. "Saya kasi tahu teman-teman Fraksi PDIP bahwa ini demi kepentingan Bali. Saya tidak menyalahkan teman-teman di Fraksi PDIP. Mereka juga tahu aturan, mereka nggak mau melabrak aturan," kata Adi Wiryatama.

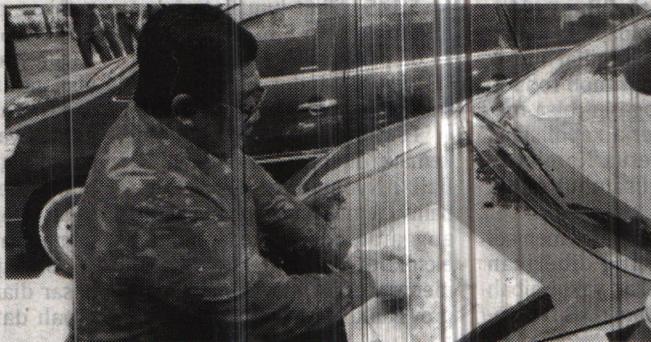
Payung hukum apa yang dipakai? "Ya, kita masukan dulu di APBD Induk 2016. Sambil jalan nanti dikoordinasikan dengan lembaga terkait soal payung hukumnya. Karena, tafsir PP 58 Tahun 2005 Pasal 75 itu beda-beda juga. Mbingungkan, apakah kita urus uangnya dulu dengan memasukkan di APBD Induk atau buat aturan seperti amanat PP 58/2005?" tegas ayah dari Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti ini. **nat**

Edisi : _____

Hal : _____



Pasar Seririt Segera Ditenderkan, Bakal Dilengkapi CCTV



● NUSABALI/SUDIRTA
BUPATI Putu Agus Suradnya mendengarkan pemaparan DED Pasar Seririt.

SINGARAJA, NusaBali

Perbaikan Pasar Seririt, pasca terbakar bulan Juli 2014 lalu, dipastikan dikerjakan di tahun 2016. Pemkab Buleleng pastikan tender proyek itu berlangsung bulan Desember 2015 ini. Diperkirakan perbaikan itu membutuhkan dana hingga Rp 14 miliar lebih. Dalam perbaikan selain ada penataan pedagang, Pemkab Buleleng juga akan memasang CCTV/kamera pengintai di setiap sudut pasar.

Dalam Detail Engineering Design (DED), secara fisik perbaikan pasar Seririt tidak ada perubahan signifikan. Artinya bentuk bangunan pasar masih seperti yang ada sekarang. Perbaikan tersebut juga mengacu pada hasil Hammer Test atas kondisi bangunan pasar. Hasil laporan itu meliputi struktur pondasi, rangka bangunan, hingga kondisi atap.

Hasil Hammer Test menyebut, perbaikan Pasar Seririt tidak perlu pembongkaran, karena kondisi rangka bangunan masih sangat kuat menopang beban. Hanya saja perlu perombakan total pada atap bangunan, karena baja ringan yang digunakan sebagai rangka atap sudah overhead dan melengkung.

Selain itu perlukan perlakuan khusus pada rangka tiang bangunan penyangga di blok A, tiang bangunan hanya perlu

dilapisi penyangga dari konstruksi kerangka baja guna memperkuat struktur.

Namun pembangunan itu lebih menekankan pada penataan pedagang, sanitasi dan lainnya, termasuk perubahan drainase pembuangan air, sehingga areal pasar tidak lagi terendam air disaat musim penghujan. "Kita tidak melihat bentuknya dulu, tapi perbaikan nanti akan diikuti dengan penetapan zona pedagang, ini penting agar ada sirkulasi dan sanitasi yang baik di dalam pasar. Nanti juga drainasenya kita atur, sehingga tidak lagi merendam areal pasar," ungkap Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, usai finalisasi DED Pasar Seririt, Rabu (4/11) di ruang pertemuan Kantor Bupati.

Dalam finalisasi DED dihadiri Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian (Diskopdagperin), Ni Made Arnika, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar I Gede Putu Satwika Yadnya, serta dari pihak rekanan PT Tri Mitra Sakti.

Selain itu, Bupati Putu Agus juga menyebut, akses keluar masuk akan dikurangi dari yang ada sekarang. Bagi Bupati, dengan banyak pintu masuk, situasi pasar menjadi rawan. "Nanti kita akan tutup beberap pintu masuk, karena saya lihat terlalu banyak pintu masuk di pasar Seririt, sehingga ini cukup rawan," imbuhnya.

Menurut Bupati, perbaikan pasar Seririt akan dilaksanakan diawal tahun 2016. Karena tender sudah bisa dilakukan pada bulan Desember tahun 2015. "Kita akan lakukan tender lebih awal, sehingga diawal tahun 2016, pekerjaan itu sudah bisa dilaksanakan," kata Putu Agus.

Sementara Dirut PD Pasar I Gede Putu Satwikayadnya menyebut, setelah pasar diperbaiki, pihaknya akan melengkapi pasar itu dengan kamera pengintai di setiap sudutnya. Selain itu, hidran air juga akan ditambah, termasuk alat yang bisa memancarkan air ketika ada tanda bahaya kebakaran. "Ini kita upayakan nanti, sehingga pasar Seririt nanti lebih aman," terangnya. **k19**

Edisi : Kamis, 5 Nov 2015

Hal : 4